



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. MUHAMMAD MARIO SAID
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
3. NHK : 488840

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 441 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 29.26 m2/29.26 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 6700 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 702.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI EX250L Tahun 2012, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT/JEEP Tahun 2020, WARISAN Rp. 445.000.000



4. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
67.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 271.728.761

F. HARTA LAINNYA Rp. 75.000.000

Sub Total Rp. 4.795.728.761

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.795.728.761

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.